

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tiga penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan bagi penulis dalam mengambil data yang relevan dengan penelitian ini. Tiga penelitian terdahulu yang peneliti gunakan yakni:

1. Penelitian pertama berjudul **“Upaya United Nations Women Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Kampanye Heforshe Di Indonesia Tahun 2016-2019”** karya dari **Rahmah Nurul Anissa**. Hasil penelitiannya berupa penjelasan bahwa UN Women bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dan NGO dalam kampanye *HeForShe* untuk mewujudkan kesetaraan gender. Upaya ini dilakukan melalui program-program, yaitu *Three ends*, *Safe cities*, *event #HeForShe Goes To Campus*, *HeForShe Run* dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman dari ketidakadilan, peningkatan aplikasi SIMFONI, bekerjasama dengan perusahaan Danone, serta meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Hasilnya upaya-upaya tersebut ternyata belum memberikan hasil yang signifikan dan masih terus dalam proses. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih banyak tindak ketidaksetaraan dan diskriminasi yang dialami perempuan di

Indonesia yang dibentuk oleh budaya patriarki. Namun, presiden Joko Widodo terus mendukung kampanye *HeForShe* ini.

Alasan pemilihan judul dikarenakan jurnal ini relevan dengan penelitian yang diangkat, yaitu mengenai peran UN Women. Penelitian ini sama-sama menjelaskan peran UN Women dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. **Perbedaan** dengan penelitian yang diangkat adalah penelitian terdahulu mengangkat kampanye *HeForShe* periode 2016-2019 sebagai objek penelitian. Sedangkan peneliti mengangkat WEPs sebagai objek penelitian dengan periode tahun 2018-2019.

2. Penelitian kedua berjudul **“Mengkaji Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme”**. Penelitian ini merupakan hasil karya dari **Iqbal Ramadhan dan Innesia Ma’sumah**. Menurut temuan studi tersebut, UN Women cukup berhasil dalam memberantas diskriminasi terhadap perempuan serta kekerasan dan ketidaksetaraan gender. Hal ini terlihat pada sejumlah program UN Women, antara lain inisiatif kota aman untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan inisiatif *Women's Leadership and Political Participant* untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Kedua inisiatif ini memberikan kesempatan bagi perempuan dan secara tidak langsung meningkatkan keamanan.

Alasan pemilihan judul dikarenakan jurnal ini relevan dengan penelitian yang diangkat, yaitu mengkaji peran UN Women dalam mewujudkan kesetaraan

gender di Indonesia dengan mengatasi kekerasan terhadap perempuan. **Perbedaan** dengan penelitian yang diangkat adalah objek penelitiannya, periode penelitian, serta jurnal ini lebih memfokuskan pembahasan pada kekerasan terhadap perempuan, serta pembahasan difokuskan untuk melihat dalam perspektif feminisme, sedangkan peneliti memfokuskan pembahasan pada pemberdayaan perekonomian perempuan.

3. Penelitian ketiga berjudul **“Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia Tahun 2016-2017”**. Penelitian ini merupakan karya dari **Galuh Artika Suri, Hamka, dan Ali Noerzaman**. Pengelolaan pengaduan, perawatan kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, dan reintegrasi sosial adalah beberapa peran yang dimainkan UN Women dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dengan mendidik penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan, menurut hasil penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah pemberian bantuan hukum, pemberdayaan ekonomi, fasilitasi pelayanan, fasilitasi pelayanan pertolongan, dan fasilitasi pelayanan sarana/prasarana bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu, melindungi hak-hak perempuan merupakan upaya lintas sektor, dan keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada tanggung jawab yang dimainkan oleh pemangku kepentingan pemerintah lainnya dalam masyarakat.

Alasan pemilihan judul dikarenakan jurnal ini relevan dengan penelitian yang diangkat, yaitu mengenai peran UN Women di Indonesia. Judul diambil

sebagai rujukan untuk lebih memahami mengenai kondisi ketimpangan gender serta peran UN Women di Indonesia. Serta memperkaya data dari referensi terkait yang ada pada jurnal ini. **Perbedaannya** berada pada periode, objek penelitian, serta teori yang peneliti gunakan. Dalam jurnal ini hanya menggunakan konsep organisasi internasional, sedangkan peneliti menambahkan dengan teori feminisme, teori pemberdayaan, dan kerja sama internasional untuk alat analisis yang lebih mendalam.

2.2. Kerangka Teori

Kerangka konsep dan teori merupakan hal yang penting untuk peneliti dalam mengkaji permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. Kerangka teoritis merupakan bagian abstrak dari hasil pemikiran yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengambil kesimpulan terhadap masalah yang dikaji oleh peneliti. Dalam setiap penelitian, selalu disertai dengan adanya kerangka teoritis dikarenakan adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan dan konstruksi.

2.2.1. Teori Feminisme

Teori Feminisme berasal dari perbedaan gender yang mana perempuan dianggap berbeda dari kaum laki-laki yang menyebabkan ketimpangan gender. Feminisme berasal dari kata *femme* yang berarti perempuan. Maka Feminisme ini

merupakan sebuah gerakan perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender dalam mendapatkan hak yang sama dalam masyarakat.

Menurut Hannam (2007) feminisme adalah gerakan yang berusaha membebaskan kaum wanita dari ketidakadilan yang disebabkan karena perbedaan gender. Dengan adanya feminisme juga berpengaruh terhadap cara berpikir wanita dalam melihat dan mendefinisikan dunia.¹

Adapun pendapat sari Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, dua orang tokoh feminis dari Asia Selatan, mereka berpendapat bahwa tidak semua feminis di tempat dan waktu yang sama dapat menerima pengertian feminisme yang sama dikarenakan faktor realitas sosial kultural dan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, serta tingkat kesadaran, persepsi, dan tindakan dari feminis itu sendiri.²

Feminisme memiliki suatu dasar untuk menganalisis masyarakat yaitu gender, dan pencetus kata “gender” dalam feminisme pertama kali dicetuskan oleh Anne Oakley. Gender itu sendiri dijelaskan di dalam Women’s Studies Encyclopedia sebagai konsep kultural yang membuat wanita dan pria seperti memiliki perbedaan baik dalam peran, posisi, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional.

Pada dataran ini, ada garis yang bersifat kultural, di mana ciri dan sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan bisa saja dipertukarkan, karena hal

¹ Hannam, June. (2007). *Feminism*. London: Pearson Education. Hlm 22.

² Kamla Bashin dan Nighat Said Khan dalam Siti Muslikhati. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam timbangan Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) hlm. 17-18.

tersebut tidak bersifat kodrati. Para pemikir teori feminisme memiliki perspektif yang berbeda-beda dan berasal dari epistemologi yang berbeda. Oleh karena itu, feminisme terbagi menjadi beberapa aliran, yaitu:

1. **Feminisme liberal**, yaitu aliran feminisme mengenai perjuangan agar perempuan mendapatkan hak-hak legal secara sosial dan politik yang sama atau setara, Aliran ini pun menolak atas segala bentuk diskriminasi yang dilakukan pada perempuan.³
2. **Feminisme radikal**, berpendapat bahwa variasi biologis atau psikologis antara laki-laki dan perempuan dapat menyebabkan disparitas gender. Aliran ini berpendapat bahwa dominasi laki-laki atas perempuan berasal dari kepemilikan dan kontrol mereka terhadap mereka. Fondasi feminisme radikal adalah gagasan bahwa struktur patriarki harus disalahkan atas penindasan perempuan. Sasaran utama penindasan kekuasaan laki-laki adalah tubuh perempuan.
3. **Feminisme sosialis**, kombinasi dari teori materialis historis Marx dan Engels. Gagasan bahwa konstruksi sosial adalah penyebab utama stereotip dan penindasan terhadap perempuan, yang mempengaruhi perempuan dari semua kelas, dan bahkan revolusi sosialis tidak selalu meningkatkan status perempuan.⁴ Beralaskan kekecewaan terhadap pembangunan modernism

³ Sugihastuti, *Gender dan Inferioritas Perempuan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 97

⁴ Gamble, Sarah. (2004). *Pengantar memahami feminisme & postfeminisme*, terj. Tim Jalasutra. Yogyakarta: Jalasutra. Hlm 54.

mengakibatkan alienasi perempuan dalam ruang publik dan konstruksi sosial. Postmodern berorientasi sebagai heteroseksis dimana timbulnya agenda yang bisa menempatkan laki-laki seperti kekasih, ayah, suami, dan teman.

4. **Feminisme psikoanalitik**, berpendapat bahwa aspek-aspek kunci dari perilaku perempuan, terutama cara berpikir mereka, berlabuh dalam jiwa feminin. Aliran ini menekankan perlunya umat manusia untuk maju menuju peradaban androgini, di mana populasi umum menggabungkan fitur-fitur yang bersifat feminin dan maskulin.
5. **Feminisme global dan multikultural**, yang menghargai nilai-nilai lokal dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal yang tidak menindas. Para feminis ini semuanya memiliki gagasan yang sama tentang diri, yang terbagi-bagi.⁵ Keadilan, bukan cara hidup, adalah tema sentral perjuangan feminis.
6. **Ekofeminisme**, sebuah gerakan feminisme dimana adanya pengangkatan kesetaraan dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan yang berbasis perempuan/feminitas.

Teori feminisme akan membantu peneliti dalam menganalisis isu yang peneliti angkat. Isu kesetaraan gender dan pemahaman mengenai ketimpangan gender merupakan fokus utama dari pembahasan feminisme. Oleh karenanya, teori ini berguna

⁵ Tong, Rosemarie. 2008. *Feminist Thought*. Yogyakarta: Jalasutra. Hlm 309.

untuk peneliti dalam melihat dan menggali isu ini melalui perspektif feminisme. Teori ini menjadi landasan analisis peneliti untuk melihat kesesuaian masalah yang ada, yaitu mengenai ketimpangan gender serta bagaimana pemberdayaan perempuan di Indonesia dengan pemahaman serta tujuan dari feminisme. Kemudian melalui teori ini juga dapat digali bentuk atau aliran feminisme apa yang diterapkan dalam isu ini.

2.2.2. Teori Pemberdayaan

Menurut Prijono (1996), pemberian kekuasaan, pengalihan kekuatan, serta didelegasikannya suatu otoritas kepada pihak lain dapat dikenal sebagai pemberdayaan. Sedangkan upaya yang dilakukan demi memberikan kemampuan dan keberdayaan dikenal sebagai memberdayakan.⁶

Pemberdayaan itu juga merupakan kemampuan seseorang, khususnya seseorang yang lemah dan rentan agar dapat memiliki kekuatan dan kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasar mereka, membiarkan mereka terbebas dari kelaparan, kesakitan dan kebodohan.
2. Akses ke sumber daya produktif sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka akan barang dan jasa yang dibutuhkan.
3. Dapat memiliki andil dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

⁶ Prijono, O.S., Pranaka, A.M.W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta.

Berdasarkan kedua pandangan ahli tersebut pemberdayaan itu meliputi upaya yang dilakukan untuk memampukan seseorang khususnya yang rentan dan lemah agar memiliki kebebasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dalam menggapai sumber-sumber produktif, serta dapat berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi dirinya.

Menurut Karl (1995), proses pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan tingkat pengetahuan, pengembangan keterampilan pengambilan keputusan, dan tindakan transformatif untuk memajukan kesetaraan gender.⁷

Teori ini digunakan peneliti sebagai alat analisis dalam melihat dan memahami pemberdayaan yang ada di dalam fenomena yang peneliti angkat. Yang dalam hal ini merupakan pemberdayaan wanita, yang diwujudkan dalam penerapan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Wanita (*Women's Empowerment Principles/WEPs*), yaitu sebagai salah satu program dan pedoman UN Women untuk mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan di sektor bisnis. Melalui teori ini dapat dianalisis kontribusi dari implementasi WEPs sebagai program pemberdayaan dengan kesesuaian teori.

2.2.3. Konsep Organisasi Internasional

⁷ Karl, M. (1995). *Women and Empowerment: Participation and Decision Making*. London: Zed Books Ltd.

Menurut Duverger, Organisasi Internasional adalah jenis hubungan internasional yang berbentuk kelompok atau kerangka dasar organisasi sosial yang diciptakan oleh hukum atau tradisi manusia dan dapat berbentuk pertukaran, perdagangan, diplomasi, atau konvensi.⁸ Menurut Clive Archer, peran organisasi internasional dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok: sebagai instrumen (untuk mencapai kepentingan tertentu berdasarkan tujuan kebijakan luar negeri mereka), sebagai arena (tempat bertemu dan mendiskusikan masalah yang dihadapi anggotanya, baik dalam negeri dan luar negeri), dan sebagai aktor independen.⁹

Organisasi internasional dapat dikategorikan menurut jenis keanggotaannya menjadi Intergovernmental Organizations (IGOs), yang meliputi perwakilan pemerintah negara bagian, dan International Non-Governmental Organizations (INGOs), yang mencakup tidak mewakili pemerintah (INGO). Berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, IGO dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum

Organisasi ini mencakup lingkup global serta memiliki banyak fungsi. Fungsi-fungsi tersebut seperti fungsi keamanan, sosial-ekonomi, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pertukaran kebudayaan dan lainnya. Contoh dari organisasi ini adalah PBB

2. Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas

⁸ Duverger, M. (1972). *The study of politics*. London: Nelson. Hlm 2.

⁹ Archer, C. (2001). *International organizations*. London: Routledge. Hlm 68

Organisasi yang dinamai juga organisasi fungsional karena hanya berfokus pada satu fungsi spesifik ini memiliki contoh seperti World Health Organizations (WHO), United Nations on AIDS (UNAIDS), serta Internasional Labour Organization (ILO)

3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya umum

Organisasi ini adalah organisasi yang sifatnya regional dan memiliki fungsi serta tanggung jawab dalam keamanan, politik dan sosial ekonominya berskala luas. Contohnya adalah Uni Eropa, OKI, Uni Afrika, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), dan lain sebagainya.

4. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya terbatas

Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial-ekonomi dan organisasi militer/pertahanan. Organisasi sosial-ekonomi contohnya adalah Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (LAFTA), serta organisasi militer/pertahanan, contohnya adalah North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan Pakta Warsawa.¹⁰

Sedangkan Anggota INGO, menurut Clive Archer, adalah kelompok, asosiasi, organisasi, atau orang-orang dari suatu negara, bukan perwakilan atau delegasi pemerintah suatu negara. Organisasi internasional dapat menjalankan dan memiliki sejumlah peran penting, antara lain:

¹⁰ Coulombis, T., & Wolfe, J. (1981). *Introduction to international relations: Power and justice*. New Delhi: Prentice-Hall. Hlm 281

1. Menetapkan metode kerjasama internasional di berbagai bidang di mana kemitraan menguntungkan sebagian besar atau semua peserta. Selain menjadi lokasi di mana keputusan kooperatif dibuat, juga menawarkan sumber daya administratif yang diperlukan untuk menerapkan keputusan tersebut.
2. Membuka berbagai saluran komunikasi antar pemerintah sehingga dapat dipelajari dan digunakan dengan lebih mudah jika terjadi masalah.¹¹

Tujuan dari peran organisasi internasional adalah untuk berkontribusi pada regulasi yang lebih komprehensif selain dari pemecahan masalah. Tiga kategori dapat digunakan untuk mengkategorikan fungsi organisasi internasional:

1. Organisasi internasional memberikan legitimasi kolektif atas tindakan organisasi dan/atau anggota individu.
2. Agenda dunia yang ditentukan oleh organisasi internasional.
3. Menggunakan organisasi internasional sebagai platform atau alat untuk koalisi anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai metode untuk menilai sifat dan susunan kekuatan dunia.

Konsep ini digunakan peneliti untuk membantu menganalisis peranan dari UN Women sebagai Organisasi Internasional, tepatnya sebagai badan PBB yang

¹¹ Bennet, A. Le Roy. (1995). *International organization*. London: George Allen and Unwin Publisher Company. Hlm 3

dikhususkan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Konsep ini sebagai alat untuk menjelaskan dan menggali mengenai peranan-peranan yang dilakukan UN Women sebagai Organisasi Internasional. Konsep ini berguna untuk menjelaskan visi serta program-program dari UN Women di Indonesia. Konsep ini berguna untuk memahami kategori UN Women sebagai Organisasi Internasional. Konsep ini digunakan untuk mengetahui motif dari UN Women sebagai Organisasi Internasional.

2.2.4. Kerja sama Internasional

Sukses kemitraan yang sah tanpa menggunakan paksaan dapat disebut sebagai kerja sama.¹² Kerja sama ini awalnya didirikan atas dasar bahwa negara-negara ingin terlibat dalam kontak yang lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi tersebut merupakan proses multilateral dan bilateral untuk menyelesaikan masalah secara kolektif.¹³

Kerja sama Internasional merupakan salah satu aksi yang dilakukan oleh para aktor hubungan internasional untuk berinteraksi dan mencapai suatu tujuan. Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, kerja sama internasional meluas ke berbagai bidang seperti kebudayaan, lingkungan hidup, ideologi, politik, sosial,

¹² Dougherty, James E., Robert L. Pfaltzgraff.. (1986). *Contending Theories*. New York: Happer and Row Publisher. Hlm 18

¹³ D.Coplin, W. (2003). *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*. Terjemahan Marsedes Marbun. Bandung: Penerbit Sinar Baru. Hlm 282.

ekonomi, keamanan dan pertahanan.¹⁴ Robert Keohane melihat bahwa kerja sama internasional dalam lingkup hubungan internasional terjadi ketika aktor-aktor di dalamnya (*state dan non state*) menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi pihak lain dan diantisipasi melalui koordinasi kebijakan bersama.

Kerja sama Internasional yang melibatkan negara dengan non-negara dalam hubungan internasional tercipta dari pandangan saling membutuhkan satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan dan kepentingan yang sama. Oleh karenanya, keberadaan kerja sama internasional menjadi instrumen dalam mengurangi biaya dan menyediakan informasi guna mencapai tujuan tersebut. Kerja sama Internasional dapat terwujud karena hal-hal berikut:

1. Ketika dua atau lebih minat, nilai, atau tujuan sejalan satu sama lain, sesuatu dapat dihasilkan, dipromosikan, atau dicapai oleh semua pihak sekaligus.
2. Gagasan atau harapan bahwa keputusan yang dibuat melalui kerjasama internasional dapat membantu suatu bangsa dalam mengejar tujuan dan cita-cita lain.
3. Penerimaan suatu masalah dalam hubungan internasional untuk memanfaatkan kesamaan dan potensi konflik kepentingan di antara para pesertanya.
4. Norma resmi atau tidak resmi yang mengatur operasi transaksi yang akan datang untuk melaksanakan dan mencapai tujuan kerjasama.¹⁵

¹⁴ Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochammad Yani. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosda Karya. Hlm 34

¹⁵ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional* (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm 75.

Teori ini digunakan oleh peneliti sebagai alat analisis untuk memahami fenomena yang ada dalam perspektif bentuk dan tujuan-tujuan dari kerja sama-kerja sama internasional yang terjalin yang dilakukan oleh UN Women dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia, khususnya melalui WEPs.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut Polancik (2009) merupakan suatu konsep yang saling terhubung terkait suatu tema sehingga dapat menggambarkan suatu alur dalam penelitian.¹⁶ Kerangka pemikiran yang berisikan tentang alur logika (*logical flow*) terkait permasalahan dan pemecahannya ini biasanya dijelaskan dan disertai dengan paparan berupa diagram. Maka dari itu dengan adanya penjelasan alur dan paparan diagram ini membuat kerangka pemikiran bisa memberikan pemahaman kepada pembaca tentang permasalahan yang diteliti.

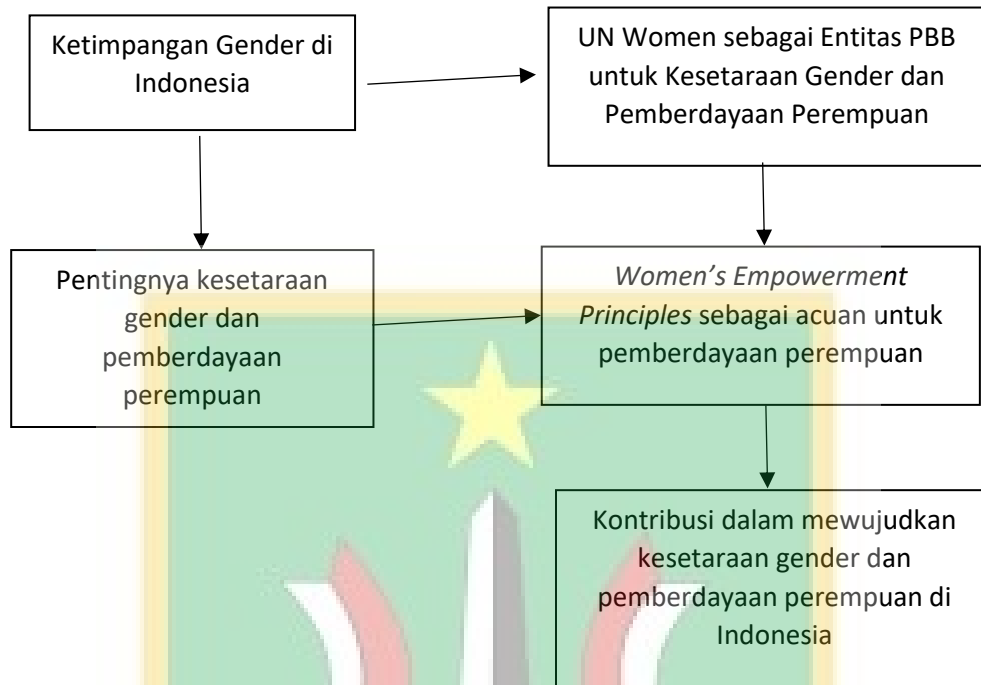
Pada penelitian alur permasalahan dibuka dengan paparan kesenjangan yang terjadi antara pria dan wanita di Indonesia yang mana di Indonesia dapat dilihat seperti terdapat perbedaan kedudukan antara pria dan wanita yang mana wanita terlihat lebih kurang dominan dibanding pria. Kesenjangan itu bisa terlihat dari ketidaksetaraan yang dialami wanita baik dari segi pendidikan, pendapatan, dan sebagainya. Ketidaksetaraan membawa dampak yang merugikan bagi kaum wanita dan tak jarang juga menjadi

¹⁶ Gregor Polancik, 2009, *Empirical Research Method Poster*. Jakarta. Hlm 65.

suatu masalah. Kurangnya pemberdayaan terhadap kaum wanita juga menjadi penyebab munculnya masalah ketimpangan antara wanita dan pria di berbagai bidang.

Kesadaran akan pentingnya memulihkan kesetaraan yang harusnya didapat oleh wanita pada tempatnya sebenarnya sudah pernah tercetus dan dilakukan oleh perlawanan dari Raden Adjeng Kartini pada tahun 1908, meski begitu dewasa ini di Indonesia masih ditemui ketimpangan gender yang masih sangat dapat terlihat. Melihat permasalahan nyata yang masih terlihat tentang terkait ketimpangan gender di Indonesia maka bergeraklah banyak organisasi-organisasi yang pada dasarnya bertujuan untuk membela kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Salah satu organisasi yang bergerak untuk membela kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah UN Women yang dibentuk dan dibawah naungan langsung dari PBB.

Adapun UN Women ini bergerak melakukan berbagai macam program yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender, memberdayakan wanita, serta program-program atau kerja sama yang berusaha untuk memberikan kesejahteraan kepada kaum wanita. Adapun program-program atau kerja sama yang dijalankan oleh UN Women berdasarkan prinsip *Women's Empowerment Principles*. *Women's Empowerment Principles* itu sendiri menawarkan panduan tentang bagaimana memberdayakan perempuan di tempat kerja, *marketplace*, komunitas atau masyarakat.



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pemikiran

